

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada kasus yang terjadi di DTI Sabah ditemukan bahwa kondisi tahanan melebihi kapasitas, ruangan penuh sesak tanpa sinar matahari yang memadai, tempat yang kotor dengan toilet yang rusak, ketersediaan makanan yang tidak layak, juga pasokan air minum dengan air bersih mengalir yang terbatas. Ditambah dengan kondisi para tahanan yang sangat mengkhawatirkan dengan badan kurus penuh luka, mayoritas tahanan terkena penyakit kulit akut dan infeksi, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang buruk. Pula adanya kasus dugaan kekerasan yang terjadi di tahanan yang hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses pendalaman. Atas hal-hal tersebut, Malaysia telah melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam aspek-aspek yang terdapat di dalam DUHAM, Konvensi Migran 1990, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, ICCPR, OPCAT, hingga Konsensus ASEAN mengenai perlindungan hak pekerja migran.
2. Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk melaksanakan kunjungan pengawasan secara intensif dan memberi bantuan logistik seperti pakaian, makanan, obat-obatan, alat kesehatan, hingga fasilitas tes PCR sebagai proses pemulangan para deportan. Proses pemulangan para PMI ilegal oleh Pemerintah Malaysia juga telah dilaksanakan dan prosesnya masih berlanjut. Indonesia juga telah memfasilitasi para deportan sesuai dengan SOP BP3MI terkait pemfasilitasan lapangan pekerjaan hingga pemulangan ke daerah asal. Serta terkait kasus dugaan kekerasan sedang

didalami oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian dapat diputuskan terkait tindak lanjut yang akan diberikan kepada Malaysia.

Sebagaimana Indonesia dan Malaysia tetap melakukan upaya untuk dalam menjalin hubungan bilateral negara yang baik, adanya MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia diharapkan mampu menekan kasus yang menimpa para pekerja migran di Malaysia serta memaksimalkan upaya pemantauan baik saat berangkat, penempatan hingga kembali. Serta tidak luput dari tetap berjalannya perlindungan hak-hak para PMI baik dari pendampingan hukum, berjalannya fungsi konsular, hingga penyelesaian masalah hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat penulis sampaikan bahwa :

1. Malaysia perlu menjalankan kewajibannya sebagai sebuah negara hukum untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak para PMI sekalipun para migran yang bermasalah hukum. Sebagaimana Malaysia yang masih terikat sebagai pihak dalam Konsensus ASEAN terkait perlindungan para pekerja migran dan guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia sesuai dengan MoU yang telah disepakati kedua negara. Malaysia juga perlu meratifikasi perjanjian internasional yang dianggap sebagai utgensis terkait perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap para pekerja migran yang menjadi tahanan.
2. Kedua negara dapat membentuk tim investigasi khusus sebagai bentuk upaya dari percepatan penanganan kasus dan mengawasi terjaminnya hak-hak para PMI yang berada di DTI Sabah. Pula dapat dilakukan pertemuan antara Indonesia dan Malaysia beserta negara ASEAN lainnya untuk melanjutkan pembahasan terkait perlindungan pekerja migran sehubungan dengan KTT ke-42 ASEAN 2023. Perlu pula

pengaturan hukum dan sanksi yang lebih tegas terkait pelanggaran HAM di Malaysia. Baik dalam hukum nasional yang berlaku di Malaysia dan ratifikasi perjanjian internasional terkait harus dilaksanakan atau dibentuk dengan segera mengingat perlindungan hak asasi manusia merupakan sebuah urgensi agar pelanggarannya tidak terulang kembali. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sangat dibutuhkan kesigapannya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pembenahan sistem yang dapat mempermudah proses perekrutan PMI di Malaysia guna mengurangi potensi timbulnya pekerja migran ilegal serta penyuluhan hukum dan edukasi khususnya di tempat terpencil dapat dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk menekan kasus-kasus pekerja migran ilegal.